

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berawal dari keresahan dan kekecewaan terhadap perilaku pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 : Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga membuat penulis tergerak untuk turut memperjuangkan hal tersebut melalui penelitian ini dengan judul “Gerakan ProFauna dalam Memperjuangkan *Animal Welfare* pada Satwa Liar Melalui Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 di Malang”. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dalam keanekaragaman hayati dan menjadi salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, begitu juga dengan hutan tropis di Indonesia yang menjadi salah satu yang terluas di bumi ini. Keanekaragaman ekosistem tersebut menjadikan Indonesia sebagai habitat dari berbagai macam satwa liar yang liar.¹

Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia.² Sehingga, Indonesia menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa-satwa yang hanya dapat ditemukan di Indonesia saja. Namun, sangat disayangkan dengan banyaknya keanekaragaman hayati di Indonesia ternyata banyak juga satwa liar yang terancam punah keberadaanya. Hal tersebut dikarenakan rusak atau hilangnya habitat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup dan juga tingginya perburuan hingga perdagangan satwa liar. Sehingga para masyarakat yang menentang akan adanya hal tersebut pada akhirnya akan bersatu dan menciptakan gerakan sosial demi mencapai tujuan mereka tersebut, baik itu kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan. Hal tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah gerakan sosial yang

¹ Gischa, Serafica. Kompas.com.” Mengapa Indonesia Memiliki Keanekaragaman Hayati?.21 Mei 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/16/080000369/mengapa-indonesia-memiliki-keanekaragaman-hayati>

² ProFauna. “Fakta Satwa Liar di Indonesia”. <https://www.ProFauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YNtA8ugzblU>

bernama ProFauna. Gerakan sosial ini adalah sebuah gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk melakukan aksi langsung di lapangan untuk melindungi satwa liar Indonesia dan habitatnya yang membawa tiga isu utama yaitu, isu perburuan satwa liar, pengelolaan konservasi penyu, dan konservasi hutan bersama masyarakat lokal.

ProFauna (*Protection of Forest and Fauna Indonesia*) adalah organisasi perlindungan hutan dan satwa liar yang didirikan oleh dua aktivis lingkungan pada tahun 1994 di Malang, Jawa Timur.³ Organisasi yang muncul pada tahun 1990-an ini tergerak atas dasar rasa kepedulian pada satwa liar, karena ditemukan fakta bahwa satwa liar diperjual belikan secara bebas. Pada saat Rosek mengunjungi beberapa pasar burung di Jakarta, dikejutkan dengan banyaknya satwa yang diperjual belikan di pasar tersebut, antara lain orang utan, siamang, kakak tua, burung muda, dan cendrawasih. Padahal seharusnya perdagangan satwa liar itu terlarang karena satwa-satwa tersebut telah dilindungi secara Undang-Undang. Keperhatian akan maraknya aksi perburuan dan perdagangan satwa liar, kemudian mendorong kedua aktivis lingkungan tersebut untuk mendirikan ProFauna. Kehadiran gerakan ini sekarang menjadi organisasi grassroot terbesar di Indonesia untuk perlindungan satwa liar. Sampai sekarang pun, gerakan ini masih memperjuangkan perlindungan hutan dan satwa liar di Indonesia, selain itu mereka juga turut aktif dalam mengedukasi masyarakat luas dalam menyikapi perlindungan dan juga perdagangan terhadap satwa liar. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh ProFauna adalah program kampanye terkait regulasi peraturan perundangan tentang satwa liar di Indonesia.

Dalam upaya melestarikan dan mengupayakan pemanfaatan keanekaragaman ekosistem dan hayati secara berkelanjutan, penting adanya pengelolaan, perlindungan, dan konservasi yang baik dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar generasi selanjutnya dapat mewarisi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu, melalui pembuatan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990: Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kebijakan tersebut lahir atas UU No.4 Tahun 1982 memuat pengaturan tentang konservasi di dalam pasal 12, yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang. Dari pasal tersebut kemudian lahir UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam diarahkan

³ ProFauna. 23 Mei 2021. <https://www.ProFauna.net/id/tentang-ProFauna/apa-itu-ProFauna#.YK0QragzbIU>

pada pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan bagi sumber daya terbaharui dapat menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Selain itu, juga melarang adanya kegiatan eksplorasi dikawasan taman nasional.

Namun hal tersebut berbanding terbalik dalam kenyataannya, banyak satwa liar yang terancam punah keberadaannya. Berkurangnya hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Namun berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda, bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar. Tingginya laju konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, hingga pertambangan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup para satwa liar dan satwa liar termasuk orangutan, hariamu sumatera, dan juga gajah sumatera.⁴ Akibat dari hilangnya hutan yang menjadi habitat utama bagi para satwa liar, terjadi perubahan laju lintasan para satwa dan juga hilangnya sumber pangan mereka. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya masuk ke area pemukiman warga dan kemudian membuka peluang dan memudahkan laju perdagangan satwa liar. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan. Dapat dilihat melalui fenomena Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang masuk kedalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah (*critically endangered*) dengan populasi mereka sekarang yang tidak lebih dari 400 ekor yang saat ini tersisa di dalam blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Hal tersebut dikarenakan mereka kehilangan habitat yang disebabkan oleh tingginya laju deforestasi dan terancam pula oleh perdagangan ilegal yang memperjual belikan bagian-bagian tubuh hewan dengan harga yang tinggi.⁵ Perdagangan ilegal tersebut terjadi di Bengkulu pada Februari 2020. Polda Bengkulu menangkap tiga pelaku perdagangan organ dan kulit harimau Sumatra yang beroperasi di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Ditemukan dua karung yang berisikan tulang belulang harimau dan kulit

⁴ ProFauna. 22 Mei 2021. <https://www.ProFauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YKzAt6gzblU>

⁵ Welianto, Ari. Kompas.com. "Hewan Liar dan Terancam Punah di Indonesia". 22 Mei 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/11/160000669/hewan-liar-dan-terancam-punah-di-indonesia?page=all>

harimau utuh. Barang tersebut akan dijual kepada warga Bengkulu dengan harga 110 juta.⁶

Fenomena kedua terjadi pada anak orang utan sumatra (*Pongo Abellii*) di Kecamatan Karang Baru Aceh, Kabupaten Aceh Timang pada Februari 2021. Polisi Daerah Aceh mengamankan empat pelaku dengan barang bukti satu individu orang utan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa orang utan tersebut mengalami sakit dan stress. Mulai pulih setelah dilakukan perawatan di Sibolangit, kemudian akan dilepaskan di hutan Cagar Alam Jantho ketika orang utan tersebut sudah benar-benar pulih. Dalam hal ini, para tersangka telah melanggar UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jaringan kuat yang dimiliki para pelaku menjadi faktor utama dalam kemuduhan akses dalam melakukan perburuan satwa liar. Perburuan umumnya terjadi di Kawasan hutan terfragmentasi, sehingga pencarian orang utan mudah dilakukan. Faktor lainnya yaitu, para pemburu memanfaatkan kesempatan konflik antara orang utan dan manusia. Dalam hal ini, orang utan yang sedang tersesah atau terperangkap di kebun warga, menjadi target utama para pemburu terutama orang utan yang memiliki bayi. Untuk mendapatkan anak orang utan tidak jarang mereka membunuh induknya terlebih dahulu. Para pelaku biasanya menggunakan senapan angin untuk membunuh induknya. Hasil perburuan tersebut kemudian dikirimkan ke daerah lain di Indonesia atau bahkan diselindupkan ke luar negri.⁷

Beralih ke wilayah Jawa Timur, tepatnya di Malang yang kenyatannya tingkat perburuan satwa liar di Malang rupanya juga cukup tinggi. Laporan yang diberikan oleh Rosek Nursahid selaku Ketua ProFauna Indonesia bahwasannya selama pandemi Covid-19 tingkat kasus perburuan satwa mengalami kenaikan. Sebelum tahun 2020, rata-rata laporan kasus perburuan yang diterima oleh ProFauna sebanyak 12 kasus perbulannya, sedangkan selama masa pandemi ini laporan yang diterima menjadi 35 kasus

⁶ Supardi, Ahmad. Mongabay.” Ditangkap, Tiga Penjual Organ dan Kulit Harimau Sumatera di Bengkulu”. <https://www.mongabay.co.id/2020/12/28/ditangkap-tiga-penjual-organ-dan-kulit-harimau-sumatera-di-bengkulu/>

⁷ Hanafiah, Junaidi. Mongabay.” Meski Dilindungi, Perdagangan Orangutan Sumatera Tidak Pernah Berhenti”. <https://www.mongabay.co.id/2021/02/16/meski-dilindungi-perdagangan-orangutan-sumatera-tidak-pernah-berhenti/>

per-bulannya.⁸ Tidak hanya itu, ProFauna juga mengungkapkan hal tragis lainnya, yaitu perburuan satwa liar di Malang yang digunakan sebagai daging konsumsi. Fakta yang ditemukan ProFauna di Malang Raya adalah satwa liar jenis Lutung Jawa dan Kijang banyak diburu untuk dijadikan daging konsumsi. Melalui penjelasan Rosek Nursahid, Kijang dan Lutung Jawa tersebut diambil dagingnya untuk dijadikan temen minum-minuman keras oleh beberapa komunitas kecil yang suka makan daging binatang langka atau Bahasa Malangnya adalah tambur.⁹

Melalui data yang ditampilkan oleh ProFauna dapat menunjukkan bahwa tingginya laju perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil dari penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut makan harganya makin mahal atau meningkat. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit, dan juga makanan yang jauh dari tercukupi bahkan kurang. Sekitar 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang. Sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku.¹⁰

Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan satwa liar tersebut serasa makin terlindungi karena lemahnya hukum dalam perlindungan terhadap satwa liar. Sehingga dapat memberikan celah bagi para masyarakat untuk terus melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar yang mengikis kesejahteraan para satwa liar. Kejahatan terhadap satwa liar kerap dianggap tidak serius, walaupun fakta bahwa perdagangan liar adalah industri ilegal terbesar keempat di dunia, setelah perdagangan manusia, senjata,

⁸ Werdiono, Defri. Kompas. "Perburuan Burung di Malang Raya Terindikasi Meningkat Selama Pandemi". https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/03/perburuan-burung-di-malang-raya-terindikasi-meningkat-selama-pandemi/?status=sukses_login&status_login=login

⁹ Erwin, Mohammad. Surya Malang. "ProFauna Ungkap Perburuan Satwa Liar di Malang Ternyata Untuk Daging Konsumsi". <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/04/23/ProFauna-ungkap-perburuan-satwa-liar-di-malang-ternyata-untuk-daging-konsumsi>

¹⁰ ProFauna. "Fakta Satwa Liar di Indonesia". <https://www.ProFauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YNtA8ugzblU>

dan perdagangan narkoba.¹¹ Dengan makin berkurangnya habitat bagi para satwa liar dan lemahnya hukuman bagi para pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar, maka makin mengikis pula kesejahteraan bagi para satwa liar di Indonesia. Satwa-satwa tersebut juga benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Sehingga dengan adanya hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990: Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masuk ke dalam Undang-undang yang turut diperjuangkan keberadaannya oleh gerakan ProFauna sampai saat ini. Upaya tersebut dilakukan dan akan terus dilakukan sampai ada kesadaran dari masyarakat dan keadilan dalam proses penegakan hukum terkait penyalanggunaan satwa liar. ProFauna percaya bahwa regulasi peraturan perundangan pada satwa liar harus ditegakkan keberadaannya, guna memberhentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Karena apabila tidak dijaga keberadaannya maka cepat atau lambat satwa-satwa tersebut akan punah keberadaannya dari bumi ini. Hal yang membuat gerakan ProFauna masih berjuang untuk melindungi satwa liar karena peranan satwa liar sebagai penyeimbang ekosistem. Setiap satwa memiliki peran yang cukup besar bagi ekosistem dan alam disekitarnya. Sehingga, satwa yang mulai mengalami kepunahan atau keliaran harus dijaga dan dilindungi keberadaannya, agar tidak memperburuk keadaan dan juga tidak terjadi perubahan ekosistem. Mengembalikan satwa liar setelah dilakukan rehabilitasi ke ekosistem aslinya adalah hal yang paling bijak dalam upaya menjaga ekosistem. Adanya satwa di bumi ini memiliki berbagai macam manfaat, salah satunya dalam tatanan kehidupan dan sebagai rantai kedupan makhluk hidup. Ragam satwa tersebut menjadi penjaga, pelindung dan juga sebagai petani hutan. Alasan tersebut diperkuat oleh Manager Pendidikan Lingkungan dan media kampanye Yayasan Palung, Mariamah Achmad mengatakan bahwa "Mengapa alasan kita semua (semua pihak) untuk menjaga dan melindungi satwa diantaranya adalah: Pertama, Populasi satwa di alam liar semakin menurun akibat dari tekanan aktivitas manusia seperti perambahan hutan, penebangan kayu, pembukaan

¹¹ Riski, Petrus. VOA." Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia". <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html>

daerah pertanian dan masifnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit skala besar, hutan tanaman industri dan pertambangan."¹²

Perjuangan gerakan-gerakan di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh perlindungan satwa (domestik – liar) saja. Namun perjuangan ini memiliki banyak ragam, mulai dari kesetaraan gender hingga perjuangan legalisasi ganja. Terbentuk dan berlangsungnya gerakan-gerakan tersebut dikarenakan ada ketidakadilan yang mereka rasakan, sehingga mereka berkumpul menjadi satu-kesatuan untuk memperjuangkan tujuan mereka bersama. Salah satunya adalah Organisasi LGN (Lingkar Ganja Nusantara). Melalui penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Darry pada tahun 2016 dengan judul “Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia” memberikan gambaran keberadaan UU Narkotika No. 35 tahun 2019 dianggap bukanlah sebuah kebijakan yang bijak. Artinya kriminalisasi terhadap tanaman ganja dengan memasukkan tanaman ganja pada golongan pertama narkotika yang dianggap berbahaya dan tidak memiliki manfaat setara dengan heroin, sabu-sabu, kokain, ekstasi, *putaw*, padahal jika melihat lebih dalam sesungguhnya narkotika golongan pertama yang dilarang adalah bahan-bahan kimia buatan tangan-tangan manusia. Hal ini tentu berbeda dengan ganja yang merupakan tanaman ciptaan Tuhan dan sesungguhnya tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia dan tidak memiliki manfaat. Salah satu bentuk untuk membuktika keseriusanya dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia dibentuklah sebuah Lembaga yang bertujuan untuk memberikan kajian terhadap pengguna ganja pada bidang medis. Lembaga tersebut diberi nama Yayasan Sativa Nusantara. Berdirinya lembaga ini juga mengambil alih peran dari LGN, pada YSN ini akan berkonsentrasi kepada bidang advokasi, edukasi, riset hal tersebut senada dengan pengangkatan ketua divisi advokasi LGN yakni Peter Dantovski sebagai ketua YSN. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya LGN untuk menuntut pembuatan regulasi mengenai peruntukan tanaman ganja di bidang medis karena menurut mereka sudah ada kegawatan cukup serius di ranah medis yang tidak mungkin lagi di substitusi itulah pentingnya kehadiran YSN ini sebagai pendukung dari

¹² Kanisius, Petrus. Kompasiana.” Ini Alasan Perlunya Menjaga dan Melindungi Satwa”.22 Mei 2021.
https://www.kompasiana.com/pit_kanisius/5bceced543322f3f4263fd42/ternyata-ini-alasan-mengapa-kita-perlu-menjaga-dan-melindungi-satwa?page=all

perjuangan LGN.¹³ Sehingga perjuangan-perjuangan Gerakan di Indonesia akan tetap berlangsung dalam memperjuangkan keadilan.

Dalam upaya memberikan konteks terkait gerakan sosial dan mobilisasi sumber daya, penelitian ini menyuguhkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan gambaran mengenai strategi gerakan sosial dalam meningkatkan pengaruhnya dan mendapat dukungan dari pihak lain. Salah satu gerakan sosial baru yang dikenal luas oleh masyarakat dan semakin menyebar di berbagai kota adalah aksi kamisan. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2019) memfokuskan pada mobilisasi sumber daya pada aksi yang secara konsisten menuntu pemerintah dalam menegakkan keadilan atas terjadinya pelanggaran HAM berat.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa strategi mobilisasi partisipan yang digunakan dalam Aksi Kamisan. Pertama, strategi menggaet *public figure*, dimana saat awal berjalan aksi ini memanfaatkan jejaring para inisiator untuk memobilisasi partisipan seperti Rieke Diah, Melanie Subono, dan Sony Tulung. Kedua, strategi penggunaan media sosial, ketika media sosial semakin marak aksi ini pun melakukan startegi besar-besaran melalui media sosial dengan membuat poster tiap minggu, video cuplikan, serta hasil dokumentasi di laman media sosial Aksi Kamisan. dan ketiga, strategi pelibatan anak-anak muda, adanya pergeseran kehadiran dari keluarga korban ke teman-teman muda bukanlah hal yang tak disengaja. Melainkan bagaimana kekuatan teman-teman muda yang didukung dengan media sosial mumpuni akan memudahkan semua proses mobilisasi partisipan saat ini. Keempat, strategi pengembangan isu, dimana Aksi Kamisan bersifat terbuka, dan tidak eksklusif. Aksi ini menjadi wadah bagi siapapun yang membutuhkan penyuaran tentang keadilan, sehingga kasus atau tema yang diangkat hingga 12 tahun pun beragam dan menyentuh berbagai golongan. Lalu faktor-faktor penghambat serta pendorong dalam Aksi Kamisan: *pertama*, faktor penghambat merupakan korban. Karena tokoh utama dalam aksi ini merupakan keluarga korban maupun korban langsung dari pelanggaran HAM berat masa lalu, namun karena dimakan usia yang berdampak pada kehadiran aksi yang secara konsisten digelar di hari kamis ini. *Kedua*, faktor pendorong dalam mobilisasi partisipan ialah media sosial dan anak – anak muda yang tertarik dengan isu-isu HAM. Ketertarikan ini dipicu oleh maraknya penggunaan Media sosial memberikan dampak besar dan signifikan dalam mobilisasi, pemanfaatan

¹³ Abbiyu, Darry Mohammad.2016.” Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia”. Skripsi. Universitas Airlangga: Surabaya

¹⁴ Nia Nadia. 2019. Mobilisasi Sumber Daya Dalam Aksi Kamisan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

media sosial yang baik secara jelas menghasilkan kehadiran di Aksi Kamisan yang awalnya aksi individual dan kini berubah menjadi masal hingga mampu menarik peserta aksi yang mencapai ratusan orang. Pegiat muda, mereka merupakan roda yang menjalankan proses Aksi Kamisan sekarang ini. Kehadiran mereka menjadi penerang guna upaya menegakkan keadilan warga Negara, serta penopang kreativitas dalam segala upaya mobilisasi partisipan dalam Aksi Kamisan.

Beragamnya isu yang dibahas dalam gerakan sosial baru ini juga ditunjukkan oleh Ahmad Tarikhul Haq (2021) berfokus pada strategi organisasi sosial lintas negara, yaitu *Food Not Bombs* dalam kampanye perdamaian dan menolak segala bentuk perang. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan dibantu data kuantitatif ini menjelaskan Sistem keanggotaan yang longgar dan fleksibel menjadikan Food Not Bombs dapat dengan mudah menarik dan mengajak orang-orang untuk ikut dalam aksinya. fleksibilitas tersebut berasal dari tidak adanya batasan latar belakang untuk menjadi anggota Food Not Bombs. Sehingga gerakan ini dapat dengan mudah mengajak orang di tingkatan grassroots. Perluasan isu dari hanya pada anti perang ke anti globalisasi menjadi salah satu faktor pertambahan sumber daya manusia Food Not Bombs. Hal tersebut memungkinkan memperluas identitas kolektif yang dimilikinya. Sehingga aktor-aktor dapat menghubungkan dirinya kepada Food Not Bombs. Contohnya proyek Unfree Trade Tour yang menjadi kegiatan menginformasikan dan mengajak massa ke aksi protes WTO di Seattle.

Pesan anti perang dan kelaparan yang dimiliki oleh Food Not Bombs disimbolkan dengan membagikan makanan tanpa mengenal latar belakang. Pembagian makanan ini merupakan bentuk framing Food Not Bombs. Membagikan makanan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Food Not Bombs di masing-masing cabangnya. Nonkekerasan merupakan prinsip yang dimiliki oleh Food Not Bombs. dalam melaksanakan aksinya. Metode kampanye nonkekerasan yang dilakukan oleh Food Not Bombs diantaranya protes dan intervensi nonkekerasan. Metode ini kemudian dibagi menjadi beberapa aksi kecil yang seringkali dirangkaikan ketika aksi yang dilakukan berlangsung lama.¹⁵

¹⁵ Ahmad Tarikhul Haq. *Strategi Gerakan Sosial Transnasional dalam Kampanye Perdamaian Internasional (Studi Kasus: Food Not Bombs)*. Hasanuddin Journal of International Affairs. Volume 1, No 1, February 2021

Isu lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang ramai disorot oleh publik. Beberapa diantara terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Suwarno menjelaskan mobilisasi sumber daya Gerakan Muncar Rumahku dalam upaya nelayan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat memelihara dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang menjadi sumber mata pencaharian.¹⁶

Dengan menggunakan teori Gerakan Sosial Edward dan Mccarthy, peneliti menjelaskan mobilisasi sumber daya dalam empat aspek, yaitu moral, kultural, sosial-organisasional, manusia, dan material.

Dalam mobilisasi sumber daya moral, Aktor Gemuruh menunjukkan sikap sukarelawan berlebih yang disebut sebagai *hyper voluntary*. Para aktor gerakan sosial secara sukarela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan uang yang mereka miliki dalam mencapai tujuan Gemuruh. Sikap ini dibutuhkan (*needs*), dibangun dengan baik (*well-development*) dan dipelihara (*maintained*) dalam interaksi antar anggotanya. Sikap *hyper voluntary* tersebut akan memunculkan komitmen antar aktor gerakan sosial yang menimbulkan solidaritas dalam gerakan sosial. Di Kecamatan Muncar juga terdapat tradisi kebudayaan masyarakat lokal yang diselenggarakan pada setiap tahunnya dengan sebutan *petik laut*.¹⁷ Gemuruh seringkali melakukan aksinya dengan ikut berpartisipasi pada ritual petik laut dengan melakukan penanaman terumbu karang beserta rumah ikan. Mereka memanfaatkan momen ritual tahunan petik laut agar aksi mereka dapat dilihat oleh masyarakat luas dan akan menambah legitimasi, simpati dan solidaritas dari pihak lain.

Dalam mobilisasi sumber daya sosial-organisasional, Gemuruh membentuk kelembagaan struktur organisasi dengan pembagian dalam beberapa bidang. Gemuruh juga memanfaatkan prasarana publik seperti dermaga pelabuhan dan Aula TPI Muncar dalam mempersiapkan aksinya. Selain itu, Gemuruh juga mempunyai akses pada media sosial. Penggunaan media sosial oleh Gemuruh sebagai upaya dalam mendapatkan dan

¹⁶ Joko Suwarno. 2016. "Gerakan Muncar Rumahku dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan. Yogyakarta: Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 2, Agustus 2016.

¹⁷ Petik laut merupakan tradisi kebudayaan masyarakat lokal Muncar yang diselenggarakan pada setiap tahunnya. Masyarakat lokal mempercayai jika petik laut merupakan bentuk terimakasih atas diberikannya hasil tangkapan ikan. Tujuan dari petik laut agar para nelayan agar diberikan keselamatan dan kelancaran saat melaut serta untuk menjamin tersedianya perikanan di Selat Bali yang melimpah.

mempertahankan partisipannya untuk mendapatkan dukungan pendanaan organisasi gerakan sosial.

Mobilisasi Sumber Daya Manusia, Gemuruh memobilisasi aktornya untuk mendapatkan sumber pendanaan dari partisipannya. Salah satu contohnya sebagai bentuk mobilisasi para aktornya adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti pembuatan akun facebook, blogger, instagram dan BBM (Black Berry Mesenger) dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Terkadang mereka juga mengganti profile picture dengan kegiatan Gemuruh yang mereka lakukan dalam pelestarian SDKP. Sehingga jejaring sosial yang terbangun dari kontak aktor Gemuruh dalam mensosialisasikan pelestarian lingkungan dapat tersampaikan kepada para partisipannya. Selain itu juga, Gemuruh juga seringkali mengajak OSIS SMA di sekitar wilayah Kecamatan Muncar dengan surat menyurat secara formal yang ditujukan pada pihak sekolah. Ini merupakan keahlian lain Gemuruh sebagai organisasi gerakan sosial secara administrasi dalam mendapatkan partisipan. Seringkali, undangan yang ditujukan pada sekolah dalam pelestarian mangrove di pesisir pantai Kecamatan Muncar.

Terakhir, peneliti menjelaskan dalam mobilisasi sumber daya material, Gemuruh sebagai organisasi gerakan sosial memobilisasi beberapa asset yang dimilikinya seperti para aktor, uang, sekretariat, seperangkat komputer, mesin printer, jaket pelampung, alat snorkeling serta satu armada perahu dalam penyelamatan SDKP di Kecamatan Muncar dan perairan Selat Bali. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah mobilisasi non-material dalam organisasi gerakan sosial. Aset nonmaterial dalam organisasi gerakan sosial dapat berupa aktor dan uang. Pengorganisasian aktor Gemuruh untuk selalu aktif dalam segala kegiatan akan semakin menarik masyarakat luas dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang mulai rusak.

Sejalan dengan penelitian di atas, peneliti hendak memberikan gambaran yang dilakukan organisasi Internasional ProFauna dalam meningkatkan kewaspadaan (awareness) dan pengaruhnya kepada masyarakat luas. Entitas Gerakan ProFauna merupakan bentuk dari gerakan sosial yang mengakomodir isu kontemporer terkait lingkungan dan satwa. Secara substantif, gerakan ProFauna (dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru (*new social movements*)), dimana gerakan tersebut cenderung berorientasi pada isu—dalam konteks ini yaitu isu lingkungan. Sementara

gerakan sosial lama (*old social movements*) berpondar dalam wacana ideologi kelas yang berdomain pada aspek ekonomi–fenomena disparitas, yang menghantarkan suatu kelompok pada aksi revolusioner vis a vis eksistensi negara, gerakan sosial baru (*new social movements*). Gerakan ProFauna, bergerak dalam koridor ecological and campaign framing (kerangka ekologi dan kampanye). Gerakan sosial baru (*new social movements*) mengakomodir berbagai bentuk tindakan kolektif yang berhubungan dengan isu- isu seputar gender, ras, etnis, lingkungan, perikemanusiaan, dan lain sebagainya. Secara kontras, hal tersebut berbeda dengan wacana gerakan sosial lama (*old social movements*) yang berpondar dalam logika ekonomi–disparitas kelas dalam masyarakat. Terlihat lebih tepat untuk berbicara mengenai kumpulan ide-ide yang saling berhubungan dan argumen-argumen yang melingkupi gerakan sosial baru (*new social movements*) dengan berbagai variasi dalam pendekatan umum atas suatu topik.¹⁸ Sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal, penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai bagaimana proses, strategi, dan juga hambatan dari gerakan perlindungan satwa liar di Malang yang mengangkat konteks ProFauna di Malang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gerakan ProFauna muncul dan berkembang di Malang?
2. Bagaimana strategi gerakan yang dilakukan oleh ProFauna dalam upaya mengkampanyekan peraturan tentang satwa liar di Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan dan juga hambatan gerakan ProFauna dalam merespons dan menangani kasus satwa liar di Malang.
2. Untuk mengetahui tentang strategi gerakan apa yang dilakukan oleh ProFauna dalam upaya mengkampanyekan peraturan tentang satwa liar di Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian mengenai perjuangan gerakan pelindung hutan dan satwa liar yang dilakukan oleh ProFauna dalam memperjuangkan *animal welfare* pada satwa liar di

¹⁸ Buechler, Steven M. 1995. *New Social Movement Theories*. The Sociological Quarterly 441- 464.

Malang dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap sebuah gerakan sosial pelindung satwa liar baru dalam melakukan perjuangan menuntut dan mengubah sebuah kebijakan. Serta dapat menjadi sebuah perbandingan Ilmu Politik serta disiplin ilmu pengetahuan yang lainnya dalam penulisan yang berkaitan dengan gerakan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Hasil yang diperoleh dari penelitian dapat memberi manfaat bagi penulis ataupun pihak lain atau masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai sebuah gerakan pelindung satwa liar dalam memperjuangkan *animal welfare* pada satwa liar di Malang. Tak hanya itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pandangan bahwa pentingnya melindungi dan melestarikan satwa liar untuk kehidupan yang lebih baik bagi seluruh makhluk hidup. Melalui penulisan ini akan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan satwa liar yang ada.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resources Mobilization Theory*)

Tulisan tentang gerakan pelindung satwa liar ini dibedah melalui teori mobilisasi sumber daya yang dicetuskan oleh Anthony Oberschall. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu gerakan sosial termasuk gerakan perlindungan satwa liar dapat terjadi melalui adanya aktor-aktor rasional yang melakukan penghimpuan sumberdaya untuk melakukan gerakan. Kemudian teori ini juga digunakan untuk menggambarkan proses gerakan sosial dari munculnya ketidakpuasan hingga upaya yang mereka lakukan dalam memperjuangkan perlindungan satwa liar di Malang. Teori ini sangat memfokuskan organisasi sosial sebagai kajian utama dari munculnya suatu gerakan sosial.

Dalam kajian ilmu sosial kontemporer, teori Mobilisasi Sumberdaya (*the Resource Mobilisation Theory*) merupakan kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif.¹⁹ Sedangkan menurut Cohen (dalam Singh), para teoritis mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) mengawali tesis mereka dengan penolakan atas perhatian terhadap peran dari perasaan (*feelings*) dan ketidakpuasan (*grievances*), serta penggunaan kategori psikologi dalam memahami

¹⁹ Buechler, Steven M. 1995. New Social Movement Theories. *The Sociological Quarterly*, Vol. 36, No. 3 (Summer, 1995), p. 441

Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*).²⁰ Senada dengan Cohen, Zurcher dan Snow dalam Klandermans (1984) menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* adalah merupakan reaksi atas pandangan tradisional dari teori-teori psikologi sosial tentang gerakan sosial. Para teoritis psikologi sosial umumnya mengkaji partisipasi orang-orang dalam suatu gerakan sosial atas dasar sifat-sifat kepribadian (*personality traits*), marginalisasi dan keterasingan (*marginality and alienation*), serta ketidakpuasan dan ideologi (*grievances and ideology*).²¹ Para teoritis yang berdiri dalam arus pemikiran ini, seperti Oberschall (1973), mempertanyakan asumsi konvensional bahwa secara umum para aktor mobilisasi kolektif adalah orang-orang yang teralienasi dari ketegangan sosial. Asumsi dasar paradigma mobilisasi sumber daya adalah bahwa gerakan kontemporer mensyaratkan sebarang komunikasi dan organisasi yang canggih, ketimbang terompak dan tabur dari gerakan “lama”. Menurut Singh, GSB adalah sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional.²² *Resource Mobilization Theory (RMT)*, pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall.²³ Oberschall mengkritik *Mass Society Theory* yang dikembangkan Kornhauser, yang pada waktu itu merupakan perspektif yang sangat dominan dalam mengkaji gerakan sosial (*social movements*). Menurut Oberschall, *mass society theory* memiliki keterbatasan dalam menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam gerakan anti-demokrasi, seperti Gerakan Nazi (*Nazism*) di Jerman. *Resource Mobilization Theory (RMT)*, memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. *Resource Mobilization Theory* lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik daripada *Mass Society Theory* atau *Relative Deprivation Theory*, serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan. Teori ini juga dibangun tidak didasarkan atas asumsi bahwa terdapat motivasi individu ketika bergabung dalam suatu gerakan, dan adanya keterasingan individu (*individual alienation*) adalah dianggap tidak relevan (kurang tepat). *Resource Mobilization Theory* berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan

²⁰ Singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE publications India, Ltd

²¹ Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participation: Social-Psychological Explanation of Resource Mobilization Theory*. *American Sociological Review*, 49 (5): pp. 583-600.

²² *Ibid.*

²³ Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.

kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*social movements*).

Menurut Oberschall (dalam Locher), istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.²⁴ Klandermans dengan mengutip pendapat Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy dan Zald, dan Snow, menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumberdaya (*the availibility of resources*) secara kolektif dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial.²⁵ Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang bukan sebagai konsekuensi dari sifat-sifat predisposisi psikologis, tetapi sebagai hasil proses-proses keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan untung dan rugi (*reward and cost*) atas keterlibatannya dalam suatu gerakan sosial. Sejalan dengan pandangan Klandermans, selanjutnya Waterman dalam Pichardo (1988), menyatakan bahwa mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) pada dasarnya suatu teori yang mengkaji rasionalitas dari perilaku gerakan sosial.²⁶ Menurut Fireman dan Gamson dalam Pichardo (1988), esensi dari *Resource Mobilization Theory (RMT)* adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial.

Beberapa teoritisi telah melakukan kajian untuk memahami basis rasionalitas partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Misalnya Olson (dalam Pichardo) mengembangkan model utilitarian untuk menjelaskan partisipasi perilaku kolektif dan menyatakan bahwa untuk dapat memahami mengapa individu terlibat dalam suatu perilaku kolektif maka harus dianalisis tentang konsep imbalan dan biaya (*reward and cost*) yang dialami oleh individu tersebut.²⁷ Berbagai bentuk biaya (*cost*) yang dihubungkan dengan partisipasi dalam aktivitas kolektif meliputi antara lain: waktu (*time*), uang (*money*), keamanan personal (*personal safety*), dan hilangnya pekerjaan (*loss of job*). Olson berpendapat bahwa aktivitas kolektif harus mampu menawarkan pilihan insentif, seperti prestise (*prestige*), gaji (*salary*), dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory*. *American Sociological Review*, Vol.49, No. 5 (Oct., 1984), pp.583-600.

²⁶ Pichardo, Nelson A. 1988. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988), pp. 97-110.

²⁷ *Ibid.*

kepemimpinan (*leadership*) untuk menarik partisipasi masyarakat dalam suatu aktivitas kolektif. Sementara Oberschall, McCarthy dan Zald, Gamson, dan Tilly (dalam Pichardo) mengkaji berbagai elemen yang diperlukan dalam suatu gerakan dan bagaimana proses dari elemen-elemen ini (khususnya sumberdaya) dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan.²⁸ Pendekatan ini mengkonsentrasikan pada isolasi dan pemahaman atas kekuatan-kekuatan yang berkontribusi terhadap munculnya gerakan sosial, khususnya persyaratan fisik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku gerakan. Konsep ini merupakan dasar bagi lahirnya teori mobilisasi sumber daya (*the resource mobilization theory*) dalam gerakan sosial. Menurut Halebsky (dalam Pichardo), teori mobilisasi sumberdaya menyamakan antara perilaku gerakan sosial (*social movement behavior*) dengan perilaku politik (*political behavior*). Secara umum model ini berpandangan bahwa keberadaan struktur pemerintah menentukan akses kelompok terhadap sumberdaya masyarakat.²⁹ Oberschall dalam Locher, menyatakan bahwa keberadaan kelompok sosial akan lebih memungkinkan untuk memunculkan suatu gerakan sosial jika kelompok sosial tersebut tersegmentasi.³⁰ Karena kelompok sosial yang tersegmentasi akan menarik keanggotaannya dari kelas khusus dalam suatu masyarakat. Semakin tersegmentasi kelompok asosiasi dalam suatu masyarakat, maka semakin besar kemungkinannya untuk dimobilisasi ke dalam *Social Movement Organization (SMO)*. Kesamaan keanggotaan dalam suatu kelompok cenderung memiliki kesamaan juga dalam hal keinginan bersama. Faktor penting mengapa kelompok lebih mudah untuk melakukan mobilisasi karena kelompok memiliki jaringan komunikasi yang udah mapan (*established*), terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan adanya partisipasi tradisional dari para anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, tempat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagai kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama. Seorang pemimpin dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial harus memusatkan perhatiannya kepada masalah mobilisasi, hal-hal yang membuat ketidakpuasan, pilihan taktis, dan infrastruktur masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial berhasil.³¹ Dalam memahami gerakan sosial, Oberschall menyodorkan lima poin penting dalam menjelaskan teori

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Triwibowo, Darmawan. 2006. Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi. Jakarta: LP3ES.

³¹ *Ibid.*

mobilisasi sumber daya yang berfokus pada proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan.

1. Organisasi Gerakan Sosial

Organisasi gerakan sosial merupakan bahasan yang sangat populer dalam mengkaji gerakan sosial. Menurut Oberschall, teori mobilisasi sumber daya menekankan pada istilah mobilisasi mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.³² Selanjutnya Sukmana menjelaskan bahwa organisasi gerakan sosial secara umum dapat dikatakan sebagai suatu organisasi identitas yang bersifat formal atau kompleks, dengan tujuan mencapai tujuan kolektif yang diwujudkan dalam suatu gerakan sosial. Setiap organisasi gerakan sosial harus mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan baik.³³ Keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, bergantung atas seberapa banyak orang-orang yang bergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan.³⁴

2. Pemimpin dan Kepemimpinan

Mengacu pada pandangan Oberschall (1973: 146-147), bahwa pemimpin potensial selalu tersedia dalam masyarakat namun kemunculan mereka bergantung atas peluang-peluang politik. Oberschall menyatakan dapat dipelajari melalui pendidikan dan latihan “*trial and error*” dalam aktivitas pengalaman melalui berkembangnya gerakan.³⁵ Dalam sebuah gerakan lazimnya dibutuhkan adanya pemimpin dan kepemimpinan (leadership). Menurut Morris dan Staggenborg, para pemimpin (*leader*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber daya, menciptakan dan memahami kesempatan – kesempatan, menyusun strategi, membingkai banyak tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.³⁶

3. Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya

³² Obberschall, A. 1973. *Social Conflict and Social Movement*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

³³ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

³⁴ Op. cit.

³⁵ Ibid.

³⁶ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Menurut Oberschall dalam sebuah gerakan sosial bahwa teori mobilisasi sumber daya menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural, seperti ketersediaan sumber daya, untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang bukan sebagai konsekuensi dari sifat-sifat predisposisi psikologis, tetapi sebagai hasil proses-proses keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan atas keterlibatannya dalam suatu gerakan sosial. Selanjutnya Oberschall mengkaji berbagai elemen yang diperlukan dalam suatu gerakan dan bagaimana proses dari elemen-elemen ini, khususnya sumber daya, dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan. Hal ini memfokuskan pada isolasi dan pemahaman atas kekuatan-kekuatan yang berkontribusi terhadap munculnya gerakan sosial, khususnya persyaratan fisik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku gerakan.³⁷

4. Jaringan dan Partisipasi

Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kolektifitas dari orang-orang yang terlibat dalam upaya menciptakan atau menolak perubahan sosial. Menurut Oberschall, teori mobilisasi sumber daya menekankan jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Sehingga esensi dari teori mobilisasi sumber daya ialah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial.³⁸ Menurut Sukmana, jejaring sosial ialah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Sebuah jaringan sosial ialah suatu struktur sosial yang terdiri dari individu (atau organisasi) disebut simpul yang terikat oleh satu atau lebih tipe hubungan saling ketergantungan tertentu, seperti persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, hubungan kepercayaan, pengetahuan, dan prestise.

5. Peluang dan Kapasitas Masyarakat

³⁷ Obberschall, A. 1973. *Social Conflict and Social Movement*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

³⁸ Ibid.

Salah satu kemunculan dan kekuatan sebuah gerakan sosial ialah adanya kapasitas masyarakat lokal. Menurut Oberschall perkembangan gerakan sosial dipandang sebagai produk dari kekuatan-kekuatan lingkungan baik bersifat internal maupun eksternal terhadap gerakan. Faktor-faktor internal meliputi: kepemimpinan, tingkat ketersediaan sumber daya, ukuran kelompok, dan tingkat dari organisasi internal. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tingkat represi dari masyarakat, tingkat simpatikan eksternal, serta jumlah dan kekuatan kelompok politik. Interaksi dari berbagai faktor tersebut disebut sebagai faktor penentu atas perkembangan dan perilaku dari suatu gerakan sosial.³⁹

Dalam penelitian ini, teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resources Mobilization Theory*) digunakan sebagai alat analisis dalam proses-proses yang membuka peluang muncul dan suksesnya gerakan ProFauna. Selain itu, Teori Mobilisasi Sumber Daya (*resources mobilization theory*) akan digunakan untuk menganalisis faktor determinan yang melingkupi gerakan perlingan satwa liar ProFauna, yaitu organisasi gerakan sosial (*social movement organization*), pemimpin dan kepemimpinan (*leader and leadership*), sumber daya dan mobilisasi sumber daya (*resources and resources mobilization*), jaringan dan partisipasi (*network and participation*), dan peluang dan kapasitas masyarakat (*Opportunities and Community Capabilites*). Melalui konsep organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) akan dijelaskan kategori tipe organisasi gerakan sosial dari gerakan perlindungan satwa liar. Selain itu, akan diidentifikasi sistem nilai dan tujuan, serta norma tindakan yang terdapat di dalam Gerakan ProFauna, yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi gerakan yang dilakukan oleh ProFauna dalam upaya mengkampanyekan peraturan tentang satwa liar di Malang. Selanjutnya, konsep pemimpin dan kepemimpinan (*leader and leadership*) akan digunakan untuk mengidentifikasi mengenai peran pemimpin dan kepemimpinan dalam struktur organisasi ProFauna mengenai pembuatan keputusan strategis (*strategic decision maker*) yang diaktualisasikan dalam aksi-aksi gerakan perlindungan satwa liar. Selain itu, konsep sumber daya dan mobilisasi sumberdaya (*resources and resources mobilization*) akan digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya moral, organisasi-sosial, manusia, dan material yang terdapat di dalam gerakan ProFauna.

³⁹ Ibid.

Konsep jaringan dan partisipasi (*network and participation*) yang terdapat di dalam Teori Mobilisasi Sumber Daya (*resources mobilization theory*) akan digunakan untuk menganalisis hubungan sosial yang terdapat di dalam gerakan perlindungan satwa liar, yang berkaitan dengan aktor individu dalam jaringan, yaitu subjek-subjek yang tergabung dan memiliki pengaruh atas gerakan perlindungan satwa liar. Selain itu, hubungan yang terdapat di antara aktor-aktor tersebut. Peluang dan kapasitas masyarakat (*Opportunities and Community Capabilites*) akan digunakan untuk memahami kondisi yang ada pada masyarakat lokal yang memungkinkan terjadinya mobilisasi untuk suatu tindakan kolektif dan mengidentifikasi model mobilisasi sumber daya dari gerakan perlindungan satwa liar ProFauna.⁴⁰

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*)

Gerakan sosial adalah gerakan kolektif yang didasarkan pada solidaritas atau kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial. Gerakan sosial diprakasari oleh adanya aksi kolektif yang muncul dengan latar belakang kondisi sebagai berikut. Yang pertama, warga negara tanpa akses ke lembaga negara formal yang akan menciptakan kondisi untuk keterasingan sosial. Kedua, minimnya norma yang menjadi kompas sosial dalam kehidupan masyarakat membuat kondisi sosial menjadi tidak teratur. Ketiga, kontrol sosial yang lemah menyebabkan orang tidak mempercayai ke dalam sistem sosial dan politik yang ada sehingga cenderung ingin mengubah dan menata kembali sistem yang ada. Keempat, adanya gesekan nilai-nilai yang saling bertentangan, yang merupakan salah satu syarat dari munculnya aksi kolektif.⁴¹

Terdapat beberapa faktor dalam gerakan sosial yang menentukan keberhasilan dan kegagalan yaitu:

1. Kepemimpinan, dalam gerakan sosial dibutuhkan pemimpin yang efektif, yaitu individu yang memiliki pemahaman dalam sistem hukum dan politik yang efektif.
2. Citra, gerakan sosial akan berhasil jika gerakan tersebut mendapatkan citra yang positif dari publik.
3. Taktik, gerakan sosial akan berhasil jika menggunakan taktik yang dapat diterima secara sosial,

⁴⁰ Sukmana, Oman. 2016. "Konsep dan Teori Gerakan Sosial." Malang: Intrans Publishing.

⁴¹ Situmorang, A. W. (2013). "Gerakan Sosial: Teori dan Praktik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4. Tujuan, dari gerakan sosial akan berhasil jika tujuan utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat turut diyakini oleh pihak luar tanpa merugikan kepentingan pihak tersebut.
5. Dukungan, gerakan sosial yang berhasil kebanyakan mendapatkan dukungan politik dan finansial dari jaringan kelompok, organisasi dan institusi lain dengan beberapa pertimbangan untuk menghindari keterasingan dari pendukung yang potensial.⁴²

Secara spesifik gerakan sosial memiliki tiga dimensi yang diantaranya yaitu:

1. Dimensi Identitas: mengartikan keadaan aktor gerakan sosial mendefinisikan dirinya.
2. Dimensi Oposisi: mengartikan tentang definisi dari lawan dari gerakan sosial.
3. Dimensi Totalitas: mengartikan keuntungan dari gerakan dan lawan yang ada dalam konflik.⁴³

Dalam gerakan sosial juga terdapat beberapa tahapan di dalam proses gerakan sosial menurut beberapa peneliti, yaitu:

- a. Tahapan Kemunculan (*Emergence*)

Dalam hal ini, gerakan sosial muncul atas dasar adanya dorongan persepsi bahwa segala kondisi yang ada sedang tidak baik.

- b. Tahapan Penggabungan (*Coalescence*)

Pasca-gerakan terbentuk, ia harus mampu mengidentifikasikan dirinya sendiri dan membangun strategi dan juga taktik untuk memulai memperkenalkan dirinya kepada publik (*Going public*).

- c. Tahapan Birokrasi (*Bureaucratization*)

Gerakan sosial agar menjadi suatu kekuatan politik, harus memiliki sifat-sifat kebirokrasian.

- d. Tahap Kemunduran (*Decline*)

Dalam gerakan sosial, seiring berjalannya waktu akan menuju fase kemunduran karena kehilangan pengaruh.⁴⁴

Dalam perkembangannya, gerakan sosial menjadi gerakan berbasis perjuangan kelas, sedikit banyak terkait dengan kelompok-kelompok Marxis. Namun, para ahli kontemporer tidak menyetujui pelabelan tersebut, mereka percaya bahwa itu adalah

⁴² Locher, D. (2002). "Collective Behaviour". New Jersey: Prentice Hall.

⁴³ Hannigan, J. A. (1985). Alain Touraine, Manuel Castells and Social Movement Theory: A Critical Appraisal. *The Sociological Quarterly* Vol. 26, No. 4

⁴⁴ Macionis, J.J. (1999). "Sociology". New Jersey: Prentice Hall.

gerakan sosial lama. Apa yang menjadi definisi gerakan sosial telah mengalami perubahan pada masa kontemporer dan menolak adanya pendapat mengenai sebuah bentuk gerakan massa tidak serta merta disebabkan oleh situasi perjuangan kelas namun lebih jauh daripada itu, sehingga para kaum intelektual kontemporer menciptakan sebutan Gerakan Sosial Baru perkembangan dari Gerakan Sosial Lama. Gerakan sosial baru dimulai dengan asumsi dasar bahwa penguasaan negara mengarah pada penyempitan ruang sosial masyarakat sipil dan pengikisan hal-hak sipil. Dalam keberlangsungannya, gerakan sosial baru lebih menekankan pada isu-isu yang bersifat non-materialistik. Kelahiran gerakan sosial baru telah menjadi sebuah alternatif dalam perjuangan antar kelas.

Konsep Organisasi Gerakan Sosial (*Social Movement Organization*)

Konsep organisasi gerakan sosial atau *social movement organization* bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi gerakan sosial beroperasi dalam mewujudkan tujuan gerakan sosial. Menurut Blumer, gerakan sosial bisa dikatakan seperti kegiatan kolektif dengan tujuan untuk menentukan sebuah tatanan baru yang ada dalam kehidupan. Gerakan sosial menurut beberapa sosiolog sangat dekat dengan perilaku kolektif, ada yang mengatakan gerakan sosial merupakan bentuk perilaku kolektif dan ada juga yang berbeda pendapat dengan mengatakan gerakan sosial bukanlah bentuk dari tindakan kolektif melainkan suatu bentuk dari tindakan kolektif. Tindakan kolektif sendiri memiliki konsep bahwa adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama yang diusung diantara kelompok. Banyak yang lebih sependapat bahwa gerakan sosial memang bukan bentuk tindakan kolektif dengan melihat dari tiga aspek, yaitu: pengorganisasian, pertimbangan dan daya tahan. Dari beberapa definisi para ahli mengenai gerakan sosial dapat disederhanakan menjadi, gerakan sosial adalah aktivitas yang dimobilisasi dengan tujuan mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial secara kolektif dengan dasar solidaritas dan tujuan yang sama. Tujuan ini ditujukan untuk suatu peristiwa yang terjadi dan dimana gerakan sosial ini tidak memiliki suatu struktur organisasi yang jelas dan tentunya mempunyai ideologi yang berorientasi untuk perubahan untuk sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas.⁴⁵

Masyarakat sipil memiliki kekuatan berupa *social power* (kekuatan sosial) dan bentuk dari kekuatan sosial ini adalah gerakan sosial. Menurut pendapat Tarrow, gerakan sosial adalah penentangan atau perlawanan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Dari pendapat tersebut dapat dielaborasi bahwa, yang pertama adalah suatu gerakan adalah perlawanan terhadap elite, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya. Kedua yaitu, suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, pihak berwenang dan elite kemudian yang ketiga adalah suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif. Kemudian yang keempat untuk meneruskan arah tujuan tindakan

⁴⁵ Soeharko. 2006. "Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia". Averos Press. Hal 14

kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial. Gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga dan aksi historis dalam masyarakat.⁴⁶ Oleh karena itu, gerakan sosial dan aksi sosial tidak muncul begitu saja dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial.

1.6.2 Konsep *Animal Welfare*

Kesejahteraan hewan atau *animal welfare* adalah kesejahteraan bagi para hewan.⁴⁷ Kesejahteraan hewan yang dimaksud dalam hal ini yaitu keadaan fisik dan mental hewan dalam kaitannya dengan kondisi ketika hewan tersebut hidup dan mati. Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2014, *animal welfare* adalah perlakuan secara wajar, alami, dan terkendali dalam kerangka perlindungan hewan dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh manusia. Penerapan *animal welfare* ini diharapkan dapat melindungi sumberdaya hewan dari perlakuan yang mengancam kesejahteraan hewan, yang pada hakekatnya untuk kesejahteraan manusia. Pada tahun 2004 OIE (Organisasi kesehatan hewan internasional) secara resmi memperkenalkan standar-standar *animal welfare* kepada negara anggota OIE. Standar tersebut dikenal dengan *Five Freedom* yang menggambarkan harapan masyarakat akan kondisi yang harus dialami hewan ketika berada di bawah kendali manusia, yaitu:

- a. *Freedom from hunger, malnutrition and thirst* yang berarti bebas dari rasa lapar, malnutrisi dan haus. Dalam hal ini, setiap hewan harus diberikan makanan dan minuman yang bergizi dan sesuai untuk kebutuhan hewan tersebut.
- b. *Freedom from fear and distress* yang berarti bebas dari rasa takut dan penderitaan. Setiap hewan harus bebas dari rasa takut, takut karena lingkungan, hewan lain, hingga akibat perlakuan dari pemilik hewan itu.
- c. *Freedom from heat stress or physical discomfort* berarti hewan terbebas dari stres akibat panas atau ketidaknyamanan fisik. Hewan harus memiliki tempat istirahat yang nyaman serta terlindung dari cuaca yang panas maupun dingin.
- d. *Freedom from pain, injury and disease* berarti bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Hewan harus diperhatikan kesehatannya, dengan melakukan

⁴⁶ Oman Sukmana. 2016. "Konsep dan Teori Gerakan Sosial". Intrans Publishing.

⁴⁷ Webster, John. *Animal welfare limping towards Eden : a practical approach to redressing the problem of our dominion over the animals*. Oxford, UK: Blackwell Pub., 2005: 2

pemeriksaan rutin agar terhindar dari cedera serta melakukan vaksinasi untuk pencegahan penyakit.

- e. *Freedom to express normal patterns of behavior* berarti kebebasan mereka dalam mengekspresikan pola perilaku normal. Hewan mempunyai sifat alami hidup dialam bebas. Bagi hewan peliharaan harus diberikan kebebasan agar dapat melakukan aktifitas alaminya.⁴⁸

1.6.4 Perundang-Undangan

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.⁴⁹ Perlindungan hukum bagi flora dan fauna liar di Indonesia tertuangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 : Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam UU tersebut menegaskan bahwa penjagaan keseimbangan ekosistem flora dan fauna di Indonesia. Selain itu pada tahun 1998 ada UU yang diajukan untuk melindungi satwa liar di luar habitatnya yaitu, SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.479/Kpts-/II/1998. Sekarang UU tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.53/Menhut-11/2016 tentang Lembaga Konservasi. Tujuan dari adanya Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi, melestarikan, mensejahterakan hidup satwa liar yang berada di alamnya dan yang di luar habitatnya. Meskipun kenyataannya permasalahan terkait upaya perlindungan dan pelestarian satwa liar masih terus berlangsung, dikarenakan binatang masih mengalami penderitaan dibawah Undang-Undang tersebut.

⁴⁸ Kusuma, I Nengah Jaya. "Pendekatan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dalam tindakan karantina".

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990: Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

1.7 Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami strategi gerakan dan hambatan yang dilalui oleh ProFauna selaku organisasi sosial yang diciptakan dengan tujuan untuk melakukan aksi langsung di lapangan untuk melestarikan hutan dan melindungi satwa liar dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan satwa liar melalui kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990: Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tepatnya di Malang, Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari tahu bagaimana awal mula dari terciptanya gerakan ProFauna, perkembangan organisasi ini sejak awal tercipta hingga saat ini, serta struktur dan elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Selain itu, poin penting yang ingin penulis teliti adalah bagaimana peran dari organisasi sosial ProFauna dalam pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi satwa liar yang menjadi korban perburuan dan perdagangan liar.

1.7.2 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk menginterpretasikan sebuah fenomena dalam setting sosial tertentu dengan melakukan wawancara, rekaman, atau catatan agar bisa didapatkan gambaran utuh mengenai fenomena serta menemukan kaitan-kaitan peristiwa yang ada di dalamnya.⁵⁰ Penelitian ini memberikan keterangan secara mendalam tentang sebuah fenomena yang terjadi dengan dukungan informasi yang lebih kaya dan mendalam. Sedangkan tipe penelitian adalah yang digunakan adalah deskriptif. Studi deskriptif menurut Biber dan Leavy bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya akan informasi melalui penggalan data *secara in-dept* (mendalam) untuk menghasilkan penelitian *thick descriptive*.⁵¹

1.7.3 Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan subjek penelitian sebagai informan penelitian. Informan tersebut diharapkan memberikan informasi dan jawaban yang sudah dirumuskan penelitian dalam fokus penelitian. Untuk itulah penelitian ini, informan ditentukan dengan cara *purposive* (disengaja) atas dasar kriteria tertentu.

⁵⁰ Denzin Norman K. dan Yvona S. Lincoln. 2011. "The Sage Handbook of Qualitative Research. California: SAGE Publications". Hal 3-4.

⁵¹ Biber And Leavy. 2011. "The Practice of Qualitative Research". California; SAGE. hal 10-11.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Rosek Nursahid selaku *Founder* Organisasi ProFauna, Erik Yanuar selaku Ranger ProFauna, Sugianto selaku Petani Hutan ProFauna, Hari Purnomo selaku Balai Konservasi Sumber Daya Alam Malang, dan Ristanti Putri selaku Dokter Hewan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memudahkan pengolahan dan menganalisis data dari narasumber, maka peneliti menggunakan alat perekam agar menghindari kehilangan informasi nantinya. Kemudian, sebelum melakukan *indepth interview* nantinya peneliti terlebih dahulu memberikan gambaran dan menjelaskan tentang latar belakang secara ringkas yang mudah dipahami mengenai topik yang akan diteliti. Peneliti memilih narasumber berdasarkan yang sesuai dengan tema dan topik yang diambil.

Di dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan juga dokumen-dokumen penunjang yang relevan dengan penelitian. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang rekstruktur, maksudnya adalah setiap narasumber diberikan pernyataan penelitian dan kemudian peneliti mencatat jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber. Pertanyaan penelitian yang diajukan berdasar pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti sebagai sebuah acuan dalam pertanyaan penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Didalam analisis penelitian, peneliti membaca hasil transkrip dari wawancara pribadi terlebih dahulu sebelum akhirnya mengkategorikan data-data yang dibutuhkan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian. Peneliti juga membuat abstraksi dalam menggunakan reduksi data yaitu, dengan mengambil dan mencatat informasi penting yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Selain itu, melakukan analisis data yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi teoritik yaitu, melakukan diola antara temuan data dan fenomena di lapangan dengan berlandaskan dengan teori konseptual yang digunakan oleh peneliti. Untuk menunjang temuan data, peneliti membuat display data yang berupa hasil wawancara narasumber atau *display* data berupa dokumen.